

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dinasti politik berdasarkan perspektif PDIP dan Partai Gelora :
 - a. Dinasti politik berdasarkan perspektif PDIP adalah PDIP merasa harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat karena itu tidak menerapkan sistem dinasti politik, ketua umum menentukan kaderisasi, dan Istilah dinasti politik digunakan untuk menggemosi PDIP.
 - b. Ada faktor-faktor yang mendorong fenomena dinasti politik. Pertama adalah proses kaderisasi di internal partai politik. Kedua adalah pandangan masyarakat mengenai calon kepala daerah. Ketiga, merupakan kultur birokrasi.
2. Praktik dinasti politik menghambat kaderisasi partai. Karena partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Keberadaan politik dinasti dianggap sebagai sebuah kegagalan partai politik dalam menciptakan ruang-ruang kaderisasi.
3. Dampak dari dinasti politik terhadap partai adalah pertama memberikan kesempatan untuk korupsi dan nepotisme. Kedua memunculkan persaingan yang tidak sehat. Ketiga menjadikan partai menjadi tidak dapat berkembang. Untuk mengatasi hal itu perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, partai politik, dan elit partai politik. Serta antusiasme masyarakat yang menjunjung tinggi budaya politik partisipatif.
4. Kebijakan dari PDIP dan Partai Gelora untuk menyikapi tentang fenomena dinasti politik
 - a. Kebijakan dari PDIP untuk menyikapi tentang fenomena dinasti politik adalah dengan menerapkan sistem demokrasi di dalam partai.
 - b. Kebijakan dari Partai Gelora untuk menyikapi tentang fenomena dinasti politik adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat.

- c. PDIP dan Partai Gelora memiliki kebijakan yang tidak jauh berbeda. Latar belakang PDIP menerapkan demokrasi total dalam partai adalah karena PDIP tidak lagi mau dituding sebagai partai tertutup yang hanya terbatas pada relasi keluarga. Salah satu upayanya adalah melakukan kebijakan rekrutmen politik dari bawah ke atas. Sedangkan latar belakang kebijakan Partai Gelora menerapkan fokus lebih pemberian pendidikan politik kepada masyarakat adalah Partai Gelora adalah partai baru dengan kader politik yang berpengalaman dan tahu dampak dinasti politik secara langsung. Selain itu, kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa partai gelora telah memilih kader terbaik untuk memimpin bangsa.

5.2 Saran

1. Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia secara luas perlu mendapatkan bekal pendidikan politik dan pembelajaran demokrasi serta melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap dinasti politik sehingga memiliki perspektif sendiri terhadap dinasti politik. Apabila dilakukan masyarakat akan lebih melek politik.

2. Partai Politik

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP sebagai partai besar sudah saatnya melakukan inovasi dalam mekanisme pengkaderan. Selain itu lebih memperketat lagi kader-kader yang direkrut agar kualitasnya baik dan menjanjikan. Di telinga masyarakat PDIP memanglah akrab dengan fenomena dinasti politik. PDIP harus bisa membantah dan membuktikan bahwa itu semua bukanlah dinasti melainkan pengkaderan asli dari PDIP.

b. Partai Gelombang Rakyat (Gelora)

Partai Gelora sebagai partai baru harus benar-benar mengantisipasi fenomena dinasti politik ini secara serius. Kebijakan yang sudah

dibuat haruslah dilaksanakan dan diawasi agar berjalan dengan baik. Jangan sampai partai gelora menjadi lumbung baru dinasti politik demi mencari power dan masa.

c. Partai Politik Lain

Partai politik sudah saatnya mengubah mekanisme kaderisasi agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas. Perekrutan itu didasarkan atas kemampuan kandidat bukan karena relasi keluarga. Dinasti politik berdampak buruk karenanya partai politik harus dapat meningkatkan kualitas dari para kader-kader, hal ini diperlukan karena mengingat bahwa kapasitas jadi kader yang memiliki kemampuan dan berintegritas tinggilah yang akan terpilih.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus mengambil sikap yang bijak. Memperketat peraturan dengan bersinergi dengan pemerintah dan memperluas pencerdasan politik ke masyarakat terkait dinasti politik.

4. Pemerintah

a. Pusat

Pemerintah pusat harus melakukan upaya nyata dalam mencegah fenomena dinasti politik ini. Pemerintah bisa bekerja sama dengan partai dan KPU untuk menentukan arah kebijakan terbaik. Namun, pembentukan kebijakan perlu juga diperkuat dengan sistem pengawasan, penegakan hukum sebagaimana mempertegas sanksi dan mekanisme pemberian sanksi sehingga menimbulkan efek jera dan membatasi ruang gerak dari politik dinasti.

b. Daerah

Pemerintah daerah wajib bersinergi dengan pemerintah pusat karena dinasti politik bisa dicegah apabila ada integrasi antara pemerintah pusat dan daerah.